

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan bukanlah masalah baru. Sejak tahun 1950-an masalah lingkungan mulai mencuat dan mendapatkan perhatian dari masyarakat dunia. Penyebab mulainya adalah terjadinya pencemaran di Jepang yang menimbulkan penyakit mengerikan, yaitu penyakit itai-itai dan penyakit minamata.¹ Dalam tahun 1962 di Amerika Serikat diterbitkan buku *The Silent Spring* yang ditulis oleh Rachel Carson. Buku itu menguraikan betapa luasnya telah terjadi pencemaran lingkungan, antara lain oleh pestisida. Karena kematian berbagai jenis hewan oleh pencemaran, maka musim semi menjadi sunyi. Dengan makin meluasnya kesadaran tentang bahaya pencemaran, pencemaran terangkat menjadi isu politik yang hangat, terutama di negara maju. Pada waktu itu terdapat anggapan umum bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari dalam proses pembangunan. Akan tetapi, meskipun pembangunan diperlukan, pembangunan itu haruslah memenuhi persyaratan tidak merusak lingkungan. Maka berkembanglah konsep *ecodevelopment*.² Masalah kerusakan lingkungan dan pembangunan terlanjutkan hanya dapat diatasi, apabila negara maju bersedia

¹ Penyakit *itai-itai* disebabkan oleh polusi kadmium, sedangkan penyakit *minamata* disebabkan oleh pencemaran merkuri metil dari limbah cair industri, lihat dalam Harada Masazumi, *Tragedi Minamata* (Sulawesi: Media Kajian Sulawesi), p. 174.

² Otto Soemarwoto, "Dari Stockholm ke Rio: Implikasinya bagi Pembangunan Nasional," *Analisis CSIS*, tahun XXI, no. 6, November-Desember (1992).

membatasi kemakmurannya untuk memberi kesempatan kepada negara sedang berkembang menaikkan kemakmuran di negaranya. Karena itu, pemerataan pembangunan antara negara maju dan negara sedang berkembang merupakan syarat mutlak. Hal ini berarti perlu diciptakannya keadilan dalam sistem perdagangan Internasional.

Pada proses pembangunan dewasa ini, terdapat kecenderungan baru yang sangat mempengaruhi pada pola pembangunan dan berimplikasi pada sektor perekonomian terutama di negara-negara berkembang. Kecenderungan ini berupa dimasukkannya permasalahan lingkungan hidup yang timbul akibat pembangunan.

Di negara-negara berkembang, permasalahan yang timbul antara lain adalah membagi dan memanajemen sumber daya alam. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan makin memperparah kerusakan lingkungan. Hal ini terjadi karena pada umumnya pembangunan nasional di negara berkembang identik dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan paradigma pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut telah membawa berbagai akibat negatif. Momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan (*at the expense of*) deteriorisasi ekologis, penyusutan sumber daya alam dan timbulnya kesenjangan sosial. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Paradigma semacam ini sangat berorientasi pada produksi. Fokus dan prioritas utamanya adalah pada sektor-sektor yang menghasilkan pertumbuhan (*growth generating sector*)

Konsep negara berkembang ataupun negara dunia ketiga yang dimaksud dalam penulisan ini berasal dari empat dimensi utama: *Politics, technology, wealth dan demography*. Atau didasarkan pada tingkat kemakmuran dan distribusi kesejahteraan, penguasaan teknologi (*high-tech*), politik yang establish serta kondisi demografi penduduk yang cenderung stabil. Negara-negara yang hanya menikmati 20% dari tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dunia, yang notabene adalah $\frac{3}{4}$ dari seluruh penduduk dunia. Umumnya negara-negara ini berada di belahan bumi bagian selatan, di bagian selatan garis Ekuator, yang terdapat di Benua Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Kegley dan Wittkopf kemudian memakai istilah *global north* untuk menjelaskan kelompok negara-negara maju (*developed countries*), dan *global south* untuk negara-negara berkembang (*developing countries*).³

Secara lebih spesifik lagi kerusakan lingkungan yang bersumber dari segi ekonomi disebabkan oleh:⁴ *pertama*, cara penglihatan ekonomi yang mempengaruhi proses pembangunan, di mana pandangan ekonomi klasik dan neo klasik yang telah dikoreksi oleh aliran Keynesian bersifat jangka pendek. Dalam kurun waktu jangka pendek perkembangan ekonomi dianalisis yang berakibat mencuatnya segi-segi perubahan jangka pendek. Padahal masalah kependudukan dan lingkungan hidup bersifat jangka panjang, sehingga perubahan yang terjadi terdesak ke belakang atau dengan kata lain belum terpikirkan. *Kedua*, ilmu ekonomi mengartikan produksi barang sebagai hasil pengolahan sumber daya

³ Charles W. Kegley, Jr dan Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*, 7th ed. (London: World Publisher, 1999), p. 107.

alam. Contohnya produksi pertanian adalah hasil pengolahan tanah, produksi kayu lapis adalah hasil pengolahan kayu dan sebagainya. Tanah, kayu hutan, maupun sumber daya alam umumnya diperlakukan sebagai input dalam proses produksi sehingga diabaikan kaitan tanah dengan ekosistem daratan, kayu dengan ekosistem hutan, dan sumber daya alam dengan ekosistem lingkungan. Pola ekonomi seperti ini jelas mengakibatkan kerusakan lingkungan karena tidak sesuai dengan prinsip pokok dalam ilmu lingkungan, di mana lingkungan fisik mempunyai hubungan timbal balik dengan segala makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Ketiga, kegagalan mekanisme pasar untuk berfungsi secara utuh, terutama dalam kaitannya dengan masalah lingkungan hidup. Proses produksi tidak hanya menghasilkan barang yang berguna yang mampu diserap dalam mekanisme pasar, tetapi juga produk negatif berupa limbah padat, cair dan gas buangan. Produk negatif ini tidak mempunyai kegunaan (*utility*) sehingga tidak punya nilai ekonomi dan akhirnya mekanisme pasar mengabaikan kehadiran produk negatif ini. Dengan kegagalan mekanisme pasar ini dalam menampungnya, maka produk negatif ini kemudian dibuang ke alam milik bersama (*Common resources*), seperti tanah, udara, lautan. Sehingga menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah.

Keempat, ilmu ekonomi cenderung memperhatikan kepentingan individu dan mengabaikan sumber daya alam milik bersama (*common resources*). Karena ada anggapan bahwa sumber daya alam adalah milik bersama maka semua orang

lahir gejala "*the tragedy of common*" yaitu rusaknya sumber daya alam milik bersama sebagai akibat perebutan dan pengurasan oleh semua pihak. Ini juga berarti bahwa mekanisme pasar tidak mampu menangkap nilai sumber daya alam milik bersama secara benar, dan cenderung diperlakukan sebagai komoditi bebas dan gratis. *Kelima*, ilmu ekonomi mengabaikan peranan komponen lingkungan dalam perhitungan Produk Nasional Bruto (PNB). Dalam PNB diperhitungkan penyusutan modal terutama yang buatan manusia, sehingga terkumpul cukup dana untuk menggantikan modal buatan manusia yang sudah habis masa pakainya. Logika ini tidak diperlakukan dalam penyusunan modal alam. Kalau pohon ditebang, ikan dibom, lahan dikuras dan semua itu dilaksanakan melewati ambang batas pembaruannya, terjadilah penyusutan modal alam. Dengan tidak dimasukkannya nilai penyusutan modal alam dalam perhitungan PNB, maka laju pertumbuhan PNB nilainya menjadi berlebihan.

Selama beberapa dasawarsa terakhir ini, bisa dikatakan tidak ada pihak atau lembaga lain yang menyamai peranan, arti penting dan pengaruh perusahaan-perusahaan multinasional (*Multinational Corporation* – MNC) dalam pertumbuhan perdagangan Internasional dan arus-arus permodalan global yang telah tumbuh sedemikian pesatnya. Perusahaan multinasional pada dasarnya adalah perusahaan yang menjalankan, memiliki serta mengendalikan operasi bisnis atau kegiatan-kegiatan usahanya di lebih dari satu negara. Raksasa-raksasa bisnis yang kebanyakan berasal dari kawasan Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang ini (meskipun belakangan ini kian banyak perusahaan multinasional

.....

Korea Selatan, Taiwan dan Brasil) memberikan peluang-peluang ekonomi yang unik sekaligus memunculkan berbagai tantangan serta berbagai masalah serius bagi negara-negara berkembang yang menjadi tuan rumah (*host country*) mereka, atau di mana perusahaan-perusahaan besar tersebut menjalankan operasi bisnisnya.⁵

Sejak kemunculannya lima dekade yang lampau (dengan manajemen yang lebih professional, tentunya), *multinational corporation*/perusahaan multinasional banyak membawa perubahan dalam memaknai konstelasi ekonomi politik internasional.

*".....there has been a great growth in the multinational corporations (MNCs), active in many countries, since 1945."*⁶

Kalau semula aktor negara (*state actor*) yang menjadi pemain dominan dalam interaksi Internasional, maka dengan kehadirannya, MNC menjadi aktor bukan negara (*non state actor*) yang memainkan peran yang signifikan dalam Ekonomi Politik Internasional (EPI) sampai saat ini.

*"..... in particular multinational organizations, are major actors on the international scene, they are very different from states"*⁷

Kiprah perusahaan multinasional (PMN) di negara-negara dunia ketiga/negara berkembang dimulai sejak 1945, berbarengan dengan proses dekolonisasi negeri-negeri jajahan di Asia, Afrika dan Amerika Selatan, yang mengakibatkan munculnya negara-negara baru di benua tersebut, yang kemudian

⁵ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi keenam (Jakarta: Erlangga, 1998), p. 145.

dikelompokkan ke dalam negara dunia ketiga (*third world*) yang mayoritas adalah negara sedang berkembang (*developed country*).

Selain itu, pada era tersebut, Perang Dingin masih berkecamuk antara blok komunis-sosialis yang dimotori oleh Uni Soviet + sekutunya versus blok kapitalis-liberal yang dimotori oleh Amerika Serikat + sekutunya. Sehingga dunia pun terbagi dalam dua kutub (bipolar), kutub barat dan kutub timur. Perang Dingin kemudian berakhir ditandai runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet, sehingga mengakibatkan dunia yang sebelumnya bipolar menjadi multipolar, terbagi dalam kutub-kutub ekonomi dalam regionalisme ekonomi dan blok-blok perdagangan bebas yang bertebaran hampir di semua kawasan. Menurut Francis Fukuyama dalam *The End of History and The Last Man*, kapitalisme dan demokrasi liberal-lah yang keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ideologi itu.

Seiring dengan meredupnya perang dingin mengakibatkan negara-negara yang semula menganut paham sosialis (umumnya negara berkembang/negara dunia ketiga) beralih menganut paham demokrasi (liberal), yang derivasinya diikuti dengan beralihnya sistem ekonomi sentralistik dengan pasar yang cenderung tertutup ke arah ekonomi liberal yang menganut sistem pasar terbuka (*open market*) dimana segala sesuatunya diserahkan kepada mekanisme pasar dan

Dalam melaksanakan pembangunan, negara-negara berkembang kemudian mengadopsi paradigma ekonomi pembangunan.⁸ Sebuah paradigma yang selalu menuntut adanya investasi dan akumulasi kapital dalam jumlah yang besar untuk menggerakkan roda pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah upaya akumulasi modal, yang keberhasilannya diukur dengan Produk nasional bruto. Dalam proses itu, semua yang membantu akumulasi kapital harus digalakkan, yang tidak membantu dipersilahkan minggir.⁹

Dan konsekuensi dari paradigma ekonomi pembangunan adalah masuknya investasi asing/*capital flows* dari luar negeri serta perusahaan multinasional secara bebas dan besar-besaran dalam struktur pembangunan ekonomi di negara berkembang.¹⁰

Dalam perkembangannya, perusahaan multinasional ternyata membawa dampak yang signifikan dalam menata struktur ekonomi, politik, dan sosial budaya di negara dunia ketiga. Keterlibatan mereka dilakukan melalui FDI (*foreign direct investment*/investasi asing langsung), portofolio maupun *joint ventures*.

Proses pembangunan yang padat modal dan eksploitatif terus berlangsung di negara dunia ketiga melalui tangan-tangan korporasi-korporasi multinasional, yang notabene berasal dari negara maju. Peluang bagi negara-

⁸ Paradigma tersebut kemudian memunculkan isu pembangunanisme (*developmentalism*), yang ternyata hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur (yang berbasis pada hutang luar negeri) tanpa diikuti dengan penataan struktur ekonomi-politik yang solid di negara-negara dunia ketiga, sehingga lebih banyak menjerumuskan negara dunia ketiga dalam hutang luar negeri yang berkepanjangan.

⁹ Mochtar Mas'ood, pengantar pada "Ketika Ekonomi Bukan Pasar Bukan Angka," dalam *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*, Revisi Baswir (Jogjakarta: IDEA & Pustaka Peklajar, 1999), p. vi.

¹⁰ Mochtar Mas'ood, pengantar pada "Ketika Ekonomi Bukan Pasar Bukan Angka," dalam *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*, Revisi Baswir (Jogjakarta: IDEA & Pustaka Peklajar, 1999), p. vi.

negara kapitalis untuk mengembangkan usahanya di negara-negara tersebut melalui perusahaan-perusahaan multinasional pun semakin terbuka. Melalui investasi langsung (*Foreign Direct Investment*), korporasi-korporasi menanamkan modalnya di negara-negara dunia ketiga dengan melakukan eksploitasi resources. Inilah yang kemudian merugikan dunia ketiga termasuk Indonesia.

Intervensi lembaga Internasional seperti IMF pada negara dunia ketiga melalui paket bantuan dengan persyaratan yang lunak tapi sangat ketat secara otomatis melegitimasi mekanisme ketergantungan (*dependency mechanism*). Bantuan IMF tersebut justru semakin mengukuhkan dan melanggengkan ketergantungan negara miskin pada negara maju, khususnya Amerika Serikat.

Paradigma pertumbuhan ekonomi dan mekanisme pasar yang selama ini diagung-agungkan ternyata memiliki kelemahan mendasar dalam mempertimbangkan aset faktor produksi yang berasal dari alam. Hal tersebut tidak ditanggapi oleh negara Dunia Ketiga. Mereka terus menerus menerapkan paradigma pertumbuhan ekonomi secara konsisten, meski konsekuensinya adalah eksploitasi dan perusakan lingkungan. Pilar sistem lingkungan hidup dunia berada di ambang kehancuran. Perhatikan saja, sebesar 42 % dari jumlah total hutan tropis di dunia sebelum masa kolonialisasi telah rusak tanpa bisa diperbaiki kembali. Secara regional, di Afrika barat dan Afrika Timur rusak sekitar 72 %, di Afrika Tengah 45%, di Amerika Tengah dan Amerika selatan 37%. Di daerah

..... (Arah Deesa India) hutan yang telah

musnah sekitar 63% dan di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina) telah rusak sekitar 38 %.¹¹ Ini kenyataan yang sungguh sangat mengkhawatirkan.

Di dunia ketiga, terjadi kolaborasi antara kekuatan kapitalisme global dengan penguasa (negara) dan pengusaha, sehingga muncul “koalisi kepentingan”. Untuk kepentingan kelanggengan koalisi inilah rakyat mudah dikorbankan. Penguasa negara berkepentingan dengan keuntungan pribadi yang diperoleh karena kewenangannya, sedangkan kekuatan kapitalisme global (yang direpresentasikan oleh korporasi multinasional) berkepentingan dengan terus menerus diperbesar demi kepentingan akumulasi modal. Dalam kerangka ini, pembuatan peraturan lingkungan di tingkat nasional tidak akan banyak melibatkan peran masyarakat. Padahal mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sesungguhnya tidak sekedar menyangkut prosedur, tetapi juga keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) : masyarakat, LSM dan organisasi profesi.¹²

Selain berdampak pada penataan struktur ekonomi politik negara tuan rumah (dalam hal ini negara berkembang), salah satu dampak negatif dari keberadaan PMN di negara-negara dunia ketiga adalah kerusakan lingkungan dan ekosistem yang parah oleh PMN, khususnya yang bergerak dalam industri ekstraktif dan manufaktur yang bahan bakunya berasal dari eksploitasi SDA. Begitu pula yang terjadi di Indonesia.

¹¹ Rudolf H. Strahm, *Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang* versi Indonesia oleh Rudy Bagindo dkk (Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 1999), p. 63.

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang masih berorientasi lebih kepada investasi asing tersebut cenderung mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Telihat dari pemberian izin kepada 13 perusahaan pertambangan untuk tetap melanjutkan operasinya di kawasan hutan lindung, yang dikukuhkan melalui uu nomor 19 tahun 2004 itu di Mahkamah Konstitusi tidak berhasil menganulir kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan pada masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri tersebut.

Akibat lebih buruk yang timbul adalah sulitnya mencari pihak mana yang harus bertanggungjawab terhadap munculnya suatu resiko kerusakan lingkungan. Karena sifatnya yang begitu kompleks sangat sulit mengurai hubungan sebab-akibat atas suatu kasus kerusakan lingkungan yang terjadi. Itu sebabnya berbagai kasus kerusakan lingkungan hanya menyisakan korban tanpa pelaku perusakan.

Indonesia yang penegakan hukumnya masih lemah, menghasilkan daftar panjang kasus kejahatan lingkungan yang pelakunya tidak tersentuh hukum. Sebutlah misalnya, kasus penebangan liar yang sangat nyata dampak rusakannya, tetapi pelakunya sangat sedikit yang terlihat di ruang pengadilan. Kasus eksploitasi PT Freeport Indonesia di Papua, perusahaan yang berbasis Amerika ini telah menambang sejak tahun 1967. Sangat ironis ketika membayangkan bahwa masyarakat Amungme, Dani dan Komoro mereka tinggal di antara gunung-gunung yang berisi kandungan emas dan tembaga terbesar di dunia, tapi mereka tetap miskin dan terbelakang. Kontrak Karya yang kerap mendapat sorotan karena dugaan sarat KKN menjadi contoh betapa kekayaan

.....

Kasus lainnya adalah, kasus pencemaran lingkungan oleh PT Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat. Sebuah catatan peristiwa lingkungan dan kesehatan yang sangat menonjol di abad ini. Alam yang mereka tempati, tempat mereka menyandarkan hidupnya berubah menjadi lokasi yang mengerikan. Tingkat perekonomian warga teluk Buyat menurun drsatis. Sejak 8 tahun silam, PT Newmont Minahasa Raya telah memendamkan 2000 ton limbahnya ke Teluk Buyat. Sistem pembuangan limbah ke dasar laut PT Newmont Minahasa Raya yang salah menjadi sumber pencemaran di Teluk Buyat Kabupaten Bolalang Mongondow Sulawesi Utara. PT NMR adalah Perusahaan tambang emas milik Amerika Serikat yang beroperasi di sana sejak tahun 1996 silam.

Kasus Buyat ini mulai mencuat ramai di media massa nasional dan Internasional, sejak minggu keempat Juli 2004. Kasus ini bermula pada pengaduan tiga orang wakil masyarakat dusun Buyat Pante, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara ke Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta. Wakil masyarakat kala itu di dampingi LBH Kesehatan dan Yayasan Suara Nurani dari Tomohon dan dr. Jane Pangemanan, Direktur Yayasan Sahabat Perempuan yang juga staf pengajar Universitas Sam Ratulangi. Mereka mengadukan ke Departemen Kesehatan karena buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga masyarakat di sana.

Kepada media massa, wakil warga Buyat menyampaikan masalah kesehatan yang dialami oleh warga di sana. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah warga menderita penyakit yang misterius. Ada yang menderita benjolan

... di dada, dan ruam kulit yang

parah. Salah satu di antara penderitanya adalah Andini Lensun. Bayi ini memiliki kelainan pada kulit dan kepala. Kulitnya bersisik dan mengkerut dan beberapa bagian kehitaman. Wajahnya terlihat tua untuk bayi berusia beberapa bulan. Andini akhirnya meninggal pada tanggal 3 Juli 2005. Kematian Andini Lensun menjadi salah satu pemicu masyarakat untuk mengadukan masalah ini.

Dokter Jane Pangemanan mengatakan ada indikasi penyakit tersebut terkait dengan pencemaran logam berat. Sebelumnya, pada 19 Juni 2004, dirinya dan 8 mahasiswa pasca sarjana kedokteran jurusan Kesehatan Masyarakat, melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan di desa sekitar pertambangan PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) tersebut. Timnya menemukan gejala-gejala penyakit aneh yang hampir sama diderita oleh 93 orang pasien yang datang berobat. Termasuk diantaranya, Andini Lensun yang berusia 5 bulan saat itu.¹³

Dokter Jane mengungkapkan hal itu kepada wartawan yang mewawancarainya. Sebelumnya, masalah kesehatan Pante Buyat tersebut sudah disampaikan pada forum seminar dan koleganya di UNSRAT. Masalah kesehatan tersebut termuat di media massa sebagai “penyakit Minamata” beberapa hari kemudian. Awalnya karena adanya liputan yang salah dari salah satu televisi yang menampilkan dokumentasi “*Minamata Disease*” yang terjadi di Jepang lebih dari 40 tahun yang lalu. Penyakit yang dikaitkan dengan kontaminasi logam berat merkuri tersebut menjadi judul pemberitaan selama satu bulan setengah hingga minggu pertama September 2004.

Pada tanggal 8 November 2004, Tim Terpadu Penanganan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup di desa Buyat Pantai dan Desa Ratotok, Kecamatan Ratotok Timur, menyampaikan laporan hasil penelitiannya.¹⁴ Tim Terpadu menemukan Teluk Buyat tercemar. Logam berat yang paling dominan berperan dalam masalah lingkungan dan kesehatan di wilayah tersebut adalah logam arsen. Salah satu temuan Tim Terpadu yang tidak terduga adalah tingginya kandungan logam arsen pada sumur penduduk. Masalah arsen ini kemudian di bahas pada beberapa pemberitaan.

Keberadaan arsen pada lingkungan di sekitar pertambangan telah diungkapkan pada suatu seminar sebulan sebelum kasus ini ramai di media massa. Pada akhir Juni 2004, sebuah seminar mengenai lingkungan di Buyat yang di selenggarakan di kampus Universitas SamRatulangi.

Sebenarnya masalah lingkungan di Teluk Buyat sudah sejak lama dipermasalahan oleh masyarakat Buyat Pante sudah sejak lama dipermasalahan oleh masyarakat Buyat Pante. Pada Bulan Juli 1996, empat bulan sejak *tailing* pertama kali dialirkan ke teluk Buyat, masyarakat menemukan puluhan ekor ikan mati mengambang. Kejadian itu tidak hanya sekali. Beberapa kali kejadian ikan mati mengapung di sekitar ujung pipa *tailing*, hingga mencapai ribuan ekor yang terjadi hingga tahun 1999. Nelayan di sekitar lokasi pembuangan tambang ini juga merasa khawatir karena bocornya pipa *tailing* pada akhir Juli 1998. Dari kedalaman air laut sekitar 10 meter, *tailing* menyembur ke permukaan.

¹⁴ Tim ini biasa disebut , " Tim Terpadu Penanganan Kasus Buyat" atau disingkat "Tim Terpadu"

Masalah lingkungan di Teluk Buyat adalah buah dari kelalaian birokrasi. Pembuangan *tailing* ke laut berlangsung tanpa disertai regulasi lingkungan yang memadai. Di negara asal industri tambang utama (Amerika, Kanada, Inggris, Australia), pembuangan *tailing* ke laut bakal sulit diterapkan.

Kini ketika metode pembuangan *tailing* ke laut (STD) diterapkan di Indonesia, akhirnya hanya membuahkan petaka. Berbagai dampak baik lingkungan maupun kesehatan yang serius terjadi di sana. Ujung-ujungnya hanya alam dan rakyatlah yang dikorbankan. Sebuah penderitaan yang harus ditanggung oleh masyarakat setempat, karena begitu dahaganya pemerintah akan investasi, serta rendahnya perangkat hukum lingkungan yang tidak memadai.

Dari pemahaman umum bisa dipahami bahwa hal tersebut sangat merugikan pemerintah/rakyat Indonesia, tapi kenapa tetap masih berlangsung. Dalam bukunya Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga edisi keenam, Michael Todaro juga menjelaskan bahwa Perusahaan Multinasional selalu bisa memperoleh perjanjian-perjanjian eksklusif antara pihak perusahaan multinasional dengan pihak pemerintah di negara tuan rumah.

Melalui Program Penilaian peringkat perusahaan (*Proper*) 2004-2005 KLH memberi label hitam kepada 72 perusahaan yang dalam kegiatan usahanya tidak ramah lingkungan. KLH akan segera melayangkan gugatan hukum terhadap lima perusahaan yang selama dua tahun tidak beranjak dari peringkat hitam, dan sembilan lainnya akan menyusul kemudian.

Masalahnya kemudian, walaupun kasus-kasus kejahatan lingkungan itu sampai ke depan hakim, muncul pesimisme mengenai kehandalan UU no.23 tahun

di samping masalah yang timbul pada tataran substansi UU tersebut menurut Direktur Eksekutif Indonesian *Center for Environmental Law* (ICEL), Indro Sugianto, ada kekuatan besar di luar jangkauan UU itu sendiri, yaitu kebijakan pemerintah yang pro-investasi, kas pendapatan asli daerah (PAD) yang harus terisi.¹⁵

Dari gambaran tentang besarnya potensi dan kinerja ekonomi mereka, maka bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ekonomi (dan terkadang juga kekuatan politik) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional tersebut, apalagi jika dibandingkan dengan pemerintahan negara-negara berkembang di mana mereka menjalankan operasi bisnisnya.¹⁶

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, setidaknya telah memberi gambaran singkat tentang dampak ekologis yang ditimbulkan oleh Perusahaan Multinasional dalam Pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Maka pokok permasalahan yang coba di kemukakan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana dampak kehadiran MNCs terhadap kondisi ekologis di Negara Sedang Berkembang ?

¹⁵ "The Impact of Investment on the Environment" *Kompas*, 16 December 2005, p. 1

C. Tujuan Penulisan

Secara garis besar ada dua tujuan dari kajian ini. *Pertama*, ingin mendeskripsikan dampak ekologis keberadaan Perusahaan Multinasional di Negara-negara Sedang berkembang atau negara dunia ketiga. *Kedua*, memperkaya wacana baru tentang kejahatan *Multinational Corporation*.

D. Kerangka Dasar Teoritik

1. Teori Dependensia

Teori yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank: *Development of Underdevelopment Theory* (pembangunan keterbelakangan) dikelompokkan juga dalam teori-teori ketergantungan.¹⁷ Namun teori yang dikemukakan oleh Frank ini termasuk dalam teori yang mengkritik teori-teori struktural sebelumnya yang mengemukakan tentang hubungan yang saling ketergantungan antara menurut istilah Frank – negara metropolis (pusat) dengan negara satelit (pinggiran) sebagai hubungan yang sejajar, dan tetap masih ada kemungkinan bagi negara satelit untuk berkembang dalam rangka ketergantungan itu.

Salah satu penggagas utama teori struktural seperti itu adalah Theotenio Dos Santos, yang melihat bahwa hubungan antara negara pusat dan pinggiran adalah hubungan yang sejajar, dimana negara pusat membutuhkan bahan mentah dari negara pinggiran sebagai bahan baku industrinya. Sedangkan negara pinggiran membutuhkan barang-barang industri dari negara pusat, sehingga hubungan yang terjadi adalah saling ketergantungan hubungan resiprosikal.¹⁸

¹⁷
¹⁸

Frank kemudian membantah dengan mengajukan argumen bahwa yang terjadi adalah hubungan yang tidak sejajar, hubungan yang ternyata hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu negara pusat. Yang terjadi adalah melalui perusahaan multinasional, pengerukan sumber daya alam di negara pinggiran sebagai bahan baku industri di negara pusat, yang terjadi adalah ketergantungan yang makin lama makin menggerogoti negara pinggiran terhadap barang-barang substitusi import. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, negara industri maju berhasil menciptakan bahan-bahan sintetis yang kemudian mengganti bahan mentah yang sebelumnya diimpor dari negara pinggiran. Akibatnya negara pinggiran mulai kehilangan pasar untuk bahan mentahnya, sementara mereka tetap dan masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap barang-barang impor dari negara maju, sehingga yang terjadi adalah hubungan yang asimetris dan negara pinggiran tetap tidak mengalami pembangunan, Frank kemudian menyebutnya sebagai *development of underdevelopment*.

Frank mengatakan bahwa keterbelakangan bukan suatu kondisi alamiah dari suatu masyarakat. Bukan juga karena masyarakat itu kekurangan modal. Keterbelakangan merupakan suatu proses ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi sebagai akibat globalisasi dari sistem kapitalisme.

Menurut Frank, dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, kaum borjuasi di negara-negara metropolis (dalam hal ini perusahaan multinasional sebagai penguasa *capital flow investment*) bekerjasama dengan

... (1) ... di negara-negara satelit dan kaum borjuasi yang

dominan di sana (tuan tanah dan pedagang/pengusaha lokal). Sebagai akibat dari kerjasama antara modal asing (perusahaan multinasional melalui FDI, portofolio, dan *joint ventures*) dengan pemerintah setempat ini, muncullah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan modal asing dan borjuasi lokal, dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak di negara tersebut.¹⁹

Di Indonesia, hal ini bisa dilihat pada masa orde baru, di mana koncoisme antara konglomerat, klan cendana dan investasi asing ditengarai menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia, dan penyebab ketergantungan Indonesia terhadap bantuan (baca: hutang) luar negeri.

Kegiatan ekonomi praktis merupakan kegiatan ekonomi modal asing yang berlokasi di negara satelit. Fungsi kaum borjuasi lokal adalah sebagai payung politik, serta pemberi kemudahan bagi beroperasinya kepentingan modal asing tersebut, melalui kebijakan pemerintah yang didukung borjuasi lokal ini adalah kebijakan yang menghasilkan keterbelakangan (*development of underdevelopment*) karena kemakmuran bagi rakyat jelata dinomor-duakan.

Dalam teori ini ada tiga komponen utama analisis: 1). Modal asing, 2). pemerintah lokal negara satelit, 3). Kaum borjuasinya. Pembangunan hanya terjadi di kalangan mereka, sedangkan rakyat banyak yang menjadi tenaga upahan, dirugikan. Maka ciri-ciri perkembangan satelit: 1. kehidupan ekonomi yang tergantung, 2. Terjadinya kerjasama antara modal asing dengan klas-kals yang berkuasa di negara-negara satelit, yakni klas pejabat pemerintah, klas tuan tanah, dan klas pedagang/pengusaha, dan 3. Terjadinya ketimpangan antara yang

kaya (kelas yang dominan melakukan eksploitasi) dan yang miskin (rakyat jelata yang dieksploitor) di negara-negara satelit. Dalam keadaan seperti ini, menggalakkan pembangunan dengan memperkuat borjuasi (pengusaha & industri lokal) merupakan usaha yang sia-sia, karena borjuasi tersebut merupakan borjuasi yang tergantung pada modal asing (FDI, portofolio, dan *joint ventures*). Akumulasi modal yang terjadi akan diserap oleh kekuatan modal asing keluar, tidak dikonsumsi atau diinvestasikan di dalam negeri itu sendiri. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara satelit (umumnya negara berkembang/dunia ketiga) hanya menguntungkan modal asing dan kepentingan pribadi borjuasi lokal. Keuntungan tidak akan menetes ke bawah seperti yang diperkirakan oleh teori *trickle down effect*. Dalam kenyataannya malah menimbulkan banyak persoalan, salah satunya yaitu eksploitasi alam oleh modal asing, yang pada akhirnya rakyat dan kerusakan alamlah yang harus dikorbankan.

E. Hipotesa

Rangkaian latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di depan serta kerangka teoritik yang coba ditawarkan dalam penulisan ini, telah mendorong penulis untuk merumuskan hipotesa sebagai berikut: Kebijakan MNC telah melahirkan kerusakan ekologis yang parah di

F. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana kajian yang sering ditemui dalam ilmu sosial, kajian ini memakai studi kepustakaan (*library research*). Pengambilan data dilakukan melalui studi berbagai literatur, jurnal, majalah, surat kabar, internet serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan dengan penulisan ini.

G. Jangkauan Penulisan

Dalam masalah tersebut penulis membatasi masalah dalam kasus kerusakan lingkungan dan pencemaran di Teluk Buyat Sulawesi Utara oleh Perusahaan tambang emas PT Newmont Minahasa Raya.

H. Sistematika penulisan

Penulisan ini direncanakan terdiri dari lima bab. Masing-masing bab mengetengahkan persoalan berikut:

Bab satu: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penulisan, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan penulisan, dan dilengkapi dengan sistematika penulisan.

Bab dua diberi topik membahas tentang apa yang dimaksud dengan MNCs, serta keyakinan Negara Dunia Ketiga terhadap sosok Perusahaan

Bab tiga mencoba untuk menceritakan tentang kebijakan negara berkembang terhadap investasi asing, diikuti masuknya PT Newmont Minahasa Raya di Indonesia.

Bab empat mencoba menguraikan dampak-dampak MNCs, dalam hal ini dampak pembuangan limbah PT NMR terhadap kerusakan lingkungan/pencemaran di Teluk Buyat.

Bab lima adalah kesimpulan yang tersusun dari tiga bab dalam